Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan

Vol 1 No 3 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-686X

DOI: 10.62734/jurnalpuspaka.v1i3.453

Perbandingan Kebijakan Pendidikan Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan

Siti Aisyah[1], Mahfud[2]

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi [1,2]

Email: aisyah19803@gmail.com[1] mahfud@untag-banyuwangi.ac.id[2]

Abstrak

Semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pendidikan. Indikator lain dari kemajuan suatu bangsa adalah tingkat pendidikannya. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, kebijakan pendidikan di Indonesia sangat berbeda. Selain itu, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari sejarah pendidikan Indonesia. Meskipun pada awalnya sulit untuk didapatkan oleh masyarakat Indonesia, pendidikan di Indonesia saat ini sangat efektif dan mudah didapatkan. Selain itu, hal ini membuat warga negara lebih mudah menggunakan pendidikan untuk mendukung tujuan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah literature review atau kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen. Pencarian literatur dengan mengambil berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan laporan riset yang berkaitan dengan topik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan kebijakan – kebijakan yang ada pada Pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci: pendidikan Indonesia, perbandingan kebijakan, kemerdekaan

Abstract

All levels of society benefit from education. Another indicator of a nation's progress is its level of education. Before and after independence, education policies in Indonesia differed significantly. Furthermore, there are many lessons to be learned from Indonesia's educational history. Although initially difficult for Indonesians to access, education in Indonesia is now highly effective and readily available. This also makes it easier for citizens to utilize education to support national goals. The method used in this research is a literature review. The data collection technique used is document analysis. The literature search involved various sources such as scientific journals, articles, books, and research reports related to the topic. The purpose of this research is to determine the differences in Indonesian education policies before and after independence.

Keywords: *Indonesian education, policy comparison, independence*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah proses yang dikenal dengan memanusiakan manusia. Pendidikan adalah mendapatkan pengetahuan yang berlangsung sepanjang hidup dalam segala situasi dan kondisi yang berdampak positif pada perkembangan setiap orang (Pristiwanti dkk., 2022). Dalam rangka memenuhi warisan budaya yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, pendidikan adalah upaya yang disengaja. Melalui pendidikan, ajaran-ajaran dari

Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan© is licensed under CC BY-SA 4

generasi sebelumnya dicontohkan kepada generasi saat ini. Karena pendidikan sama kompleksnya dengan tujuannya yaitu manusia (Rahman dkk., 2022)

Melalui pendidikan yang terorganisir, peserta didik dapatPeserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta bakat yang diperlukan dirinya dan masyarakat melalui pendidikan yang terstruktur (Rahman dkk., 2022).

Pemerintah menggunakan kebijakan sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan yang dianggap dapat meningkatkan kehidupan masyarakat di berbagai bidang seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan bidang-bidang lainnya (Bakry, 2010).

Evolusi pendidikan sejak Indonesia merdeka memberikan gambaran yang menantang. Menteri Pengajaran dan Pendidikan membentuk sebuah komite untuk mempersiapkan rancangan undang-undang tentang pengajaran dan pendidikan dalam sebuah kongres pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang mencerminkan ideologi nasional Indonesia. Hingga tahun 1965, sistem pendidikan Belanda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik pendidikan di Indonesia (Dangu dkk., 2022).

Diskriminasi antara anak-anak pejabat dan rakyat biasa terlihat jelas dalam prosedur pendidikan kolonial. Anak-anak dari kelas atas masih menjadi satu-satunya yang memiliki akses ke kesempatan yang luas. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya adalah menciptakan tenaga kerja yang dapat melaksanakan tugas mereka untuk mengeksploitasi kekayaan dan sumber daya alam Indonesia, pendidikan dimaksudkan untuk membantu penjajah dalam mempertahankan penjajahan mereka (Dangu dkk., 2022).

Penelitian terdahulu yang membahas topik ini sudah pernah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2015) dan (Azizah dkk., 2023), penelitian ini menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia pada masa ke masa. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Aisy & Hudaidah, 2021) dan (Fadli & Kumalasari, 2019), penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan pendidikan Indonesia pada awal kemerdekaan dan masa orde lama. Ketiga penelitian tersebut telah memberikan wawasan yang berharga,

bagaimana kebijakan pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Tetapi berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas perbedaan kebijakan – kebijakan pendidikan Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengkaji kebijakan pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta perbedaan di antara kedua era tersebut. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi variasi kebijakan pendidikan Indonesia secara berkala.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review atau kajian Pustaka (Sugiyono, 2022). Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur dan analisis dokumen yang berkaitan dengan "Perbedaan Kebijakan Pendidikan Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan."

Pencarian literatur dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah seperti artikel jurnal, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen lain yang relevan. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui berbagai media, termasuk mesin pencari ilmiah, database jurnal, perpustakaan digital, dan situs resmi lembaga pendidikan atau pemerintahan. Literatur yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Metode literature review ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan pendidikan Indonesia dari berbagai sudut pandang. Selain itu, pendekatan ini memberikan keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan sumber daya karena tidak memerlukan kegiatan pengumpulan data primer. Dengan menelaah literatur yang telah ada, peneliti dapat menyusun analisis yang kuat dan argumentatif berdasarkan kajian teoretis yang telah diakui dalam bidang pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Kemajuan sistem pendidikan pada suatu negara mempengaruhi berhasil atau tidaknya negara tersebut, maka dalam kehidupan individu, keluarga, bangsa, dan negara, pendidikan merupakan hal yang krusial dan tak tergantikan. (Rusdi, 2007). Seringkali mendengar, berbicara, dan bertindak berdasarkan ide kebijakan pendidikan, namun kurang memahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui kebijakan pendidikan terlebih dahulu. Pertimbangan akal sehat dalam sebuah kebijakan menjadi pilar utamanya. Berbagai produk kebijakan telah muncul seiring dengan pertumbuhan Negara Indonesia, dan proses politik terkait erat dengan proses pembuatannya. Proses perumusan kebijakan masih terus dilakukan hingga saat ini, seiring dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat (Rahmawati & Khoiri, 2023).

Dalam masyarakat kontemporer seperti Indonesia, pendidikan telah menjadi topik diskusi. Komponen penting dalam kehidupan budaya adalah pendidikan non-formal dan informal. Dalam bentuknya yang paling dasar, pendidikan sudah terjalin ke dalam tatanan masyarakat (Rahmawati & Khoiri, 2023).

Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa VOC yang merupakan kongsi dagang, terkait erat dengan tujuan dan kepentingan bisnis. Selama abad ke-17 hingga ke-18 Masehi, pendidikan di Indonesia harus diawasi dan dikontrol secara ketat oleh VOC, berbeda dengan di Belanda, organisasi-organisasi keagamaan diizinkan untuk secara bebas menjalankan institusi pendidikan. Oleh karena itu, mereka berstatus sebagai pegawai VOC yang mendapatkan pangkat dan gaji, bahkan ketika organisasi keagamaan (gereja) terus memberikan pendidikan. Dari sini jelaslah bahwa sistem pendidikan yang berlaku pada saat itu adalah sistem pendidikan agama (Kristen Protestan) (Aiwan & Rehani, 2022).

Dalam upaya menyebarkan agama Kristen ke seluruh Indonesia, didirikanlah lembaga pendidikan pada abad 16 dan 17, pendidikan ini ditujukan untuk pribumi dan orang Belanda. Keberadaan lembaga pendidikan ini menyadarkan pihak

kompeni yang membutuhkan pegawai rendah yang bisa membaca dan menulis (Wahyuni, 2015).

Bagi rakyat Indonesia, kemajuan pendidikan di bawah penjajahan Jepang di negara mereka berarti berakhirnya struktur politik kolonial Belanda. Pada saat itu, memenangkan perang merupakan tujuan utama pendidikan masyarakat Jepang. Pada periode ini didirikan sekolah rakyat bernama Kokumin Gako dan setelah enam tahun pengajaran bahasa Belanda dihentikan, dan bahasa Indonesia diadopsi sebagai bahasa pengantar utama (Wahyuni, 2015).

1. Kebijakan pendidikan pada masa penjajahan Belanda

Sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda merupakan cerminan dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Sistem pendidikan kolonial Belanda tercermin di sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda. Tujuan, karakteristik dasarciri-ciri dasar, dan desaintata letak kelembagaan sekolah-sekolah ini merupakan hasil dari sistem pendidikan yangdirancang oleh Belanda.Belanda. Sistem pendidikan kolonial Belanda tampaknya menjadi lebih sulit karena adanya hubungan antara politik dan pendidikan. Sekolah-sekolah dikategorikan sebagai hasil dari niat untuk menerapkan prinsip diskriminasi (Azizah dkk., 2023).

Jenis-jenis sekolah pada masa awal sistem pendidikan formal di Indonesia terdiri atas beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan kolonial saat itu. Salah satunya adalah Pendidikan Rendah (Lager Onderwijs), yaitu jenjang pendidikan dasar yang merupakan fondasi awal bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan dasar. Selain itu, terdapat Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar daerah, yang disesuaikan dengan konteks lokal agar peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran dalam bahasa ibu mereka.

Selanjutnya, dikenal juga Sekolah Peralihan (Schakel School), yang berfungsi sebagai jembatan atau tahapan transisi antara Sekolah Desa dan Sekolah Dasar dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda. Sekolah ini ditujukan untuk mempersiapkan siswa yang sebelumnya belajar dalam bahasa daerah agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan kurikulum dan bahasa pengantar yang lebih kompleks. Model ini mencerminkan sistem stratifikasi pendidikan pada masa kolonial, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik dan sosial saat itu.

Berikut bagan pembagian jenis – jenis sekolah pada masa kolonial Belanda:

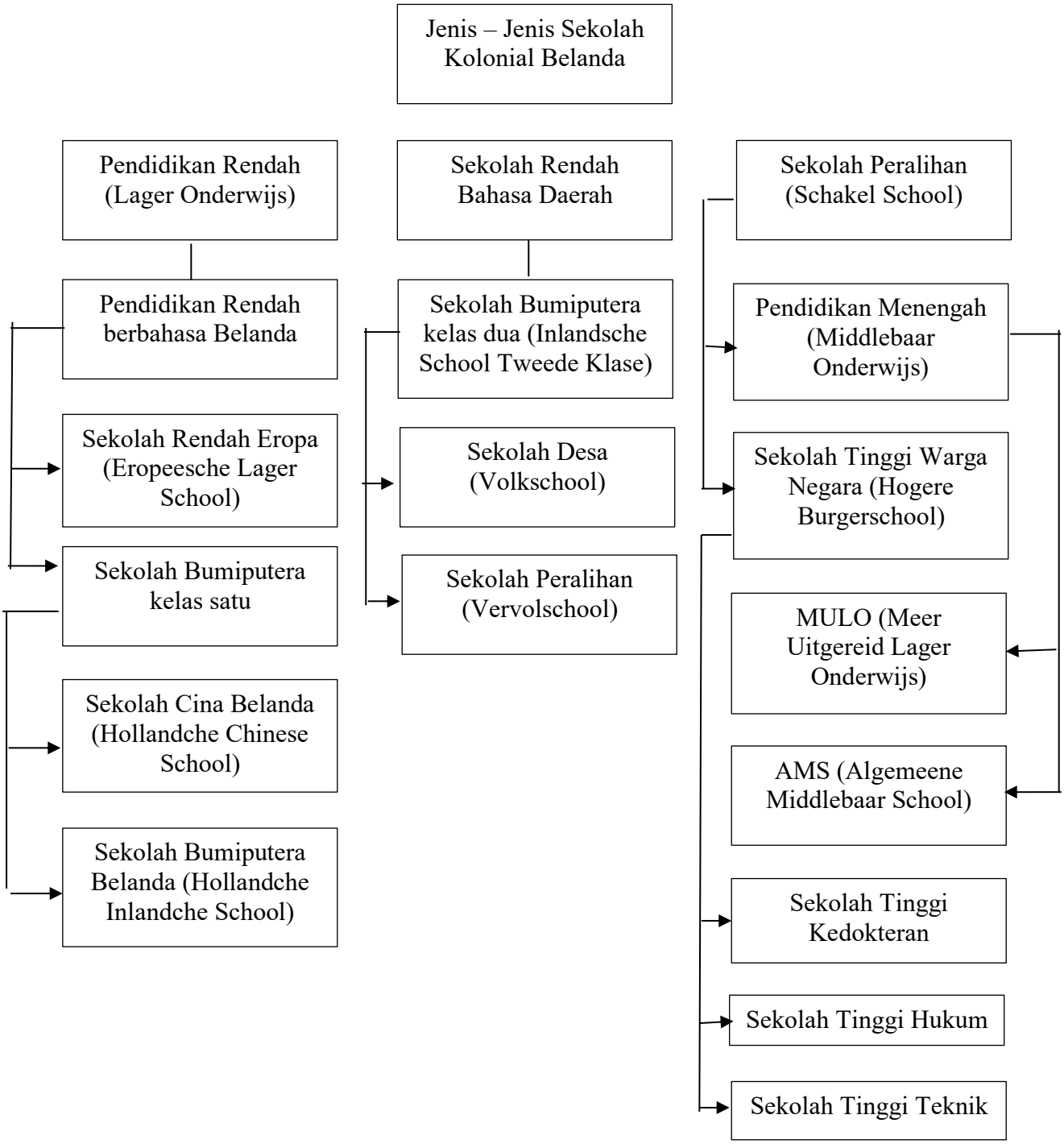

Klasifikasi sekolah yang disebutkan di atas menggambarkan pola pikir diskriminatif yang sebenarnya dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Hal ini terlihat dari posisi sosial berdasarkan keturunan dikaitkan dengan klasifikasi sekolah berdasarkan keturunan. Kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk

mengenyam pendidikan tinggi lebih sedikit. Dibandingkan dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terdapat lebih banyak jenis sekolah di sektor sosial, pendidikan rendah, dan pendidikan. Dan tampaknya pengaturan ini memang direncanakan untuk membatasi kesempatan bagi masyarakat adat untuk membawa anak-anak mereka ke pendidikan menengah dan tinggi (Azizah dkk., 2023).

Pengaturan ini dirancang untuk membatasi akses masyarakat pribumi ke pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan. Selain itu, sekolah-sekolah dibagi menjadi sekolah Bumiputera, Tionghoa, dan Eropa. Dengan demikian, kesempatan pendidikan bagi penduduk pribumi di lembaga-lembaga pemerintah selalu dibatasi dengan berbagai cara (Azizah dkk., 2023).

2. Kebijakan pendidikan pada masa penjajahan Jepang

Penduduk Indonesia pada awalnya menyambut baik dimulainya kekuasaan Jepang di Hindia Belanda. Alasan dari kegembiraan ini adalah karena Jepang dipandang sebagai negara yang mampu menyelamatkan rakyat Indonesia dari kekuasaan kolonial Belanda. Karena Jepang terampil mengumbar janji dan memberikan harapan kepada rakyat Indonesia yang merindukan kemerdekaan, maka kepercayaan kepada Jepang sebagai negara pembebas pun tumbuh. Jepang sangat menyadari keadaan dan perasaan rakyat Indonesia, yang dengan penuh semangat mempertahankan kemerdekaan dan rasa kebanggaan nasional mereka (Nurbaity, 2018).

Hanya sedikit sekolah yang diizinkan untuk dibuka kembali setelah pengambilalihan oleh tentara pendudukan Jepang. Selain itu, belum ada rencana yang dibuat untuk mengatur sekolah. Pertama, sejumlah tantangan perlu diatasi. Guru, terutama di sekolah menengah, adalah salah satu tantangan tersebut. Jumlah guru yang dibutuhkan untuk mengajar di sekolah-sekolah tidak mencukupi. Guru-guru didatangkan dari berbagai daerah untuk mengajar selama satu bulan untuk mengatasi hal ini. Ketika para pengajar ini kembali, mereka berbagi dan menginstruksikan kepada para pendidik dan siswa lainnya tentang hasil pendidikan mereka (Nurbaity, 2018).

Apel pagi adalah salah satu cara yang paling jelas menunjukkan bahwa pendidikan di Jepang memiliki struktur yang berbeda. Setiap pagi, semua siswa dan guru berkumpul di lapangan. Ritual pagi lainnya termasuk bango, yang melibatkan

penghitungan jumlah siswa yang hadir untuk menentukan siapa yang tidak hadir. Selanjutnya, membungkuk ke arah timur laut dalam seikerei, yang merupakan bentuk penghormatan kepada Tenno Heika. Selanjutnya, melakukan taiso, yaitu gerakan tubuh selama 5 menit.

Mereka yang gagal memenuhi tanggung jawab terkait sekolah akan menghadapi konsekuensi di bawah pendudukan Jepang. Hukumannya sangat sederhana, pelanggar akan mendapatkan pukulan. Hukuman ini diberikan oleh siswa, yang biasanya adalah ketua kelas atau regu, dan bukan oleh guru.

Jenis – jenis sekolah Jepang yang diadakan oleh pemerintah pendudukan Jepang, antara lain:

a) Sekolah Rakyat, Sekolah ini distandarisasi selama enam tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan, baik dari segi pelaksanaan maupun isi.
b) Sekolah Menengah, yang dibagi menjadi dua kategori: Sekolah Menengah Pertama, yang merupakan program studi tiga tahun yang dikembangkan dari sekolah rakyat. Selain itu, ada juga Sekolah Menengah Atas (SMA), yang merupakan lembaga pendidikan menengah umum yang prestisius dengan program pendidikan tiga tahun.
c) Sekolah kejuruan, termasuk Sekolah Teknik Menengah, Sekolah Pelayaran Tinggi, Sekolah Pertukangan, dan Sekolah Pertanian.
d) Sekolah Guru dibagi menjadi tiga bagian: Sekolah Guru yang berlangsung dua tahun setelah Sekolah Rakyat, Sekolah Guru yang berlangsung empat tahun setelah Sekolah Rakyat, dan Sekolah Guru yang berlangsung enam tahun setelah Sekolah Rakyat.
e) Perguruan Tinggi, Pendudukan Jepang menutup hampir semua perguruan tinggi. Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor, Sekolah Tinggi Pangreh Praja (Kenkoku Gakuin) sebagai pengganti MOSVIA di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik (Kogyo Dai Gakko) di Bandung, dan Sekolah Tinggi Kedokteran (Ika Dai Gakko) di Jakarta merupakan beberapa sekolah tinggi yang dibuka kembali.

Secara umum, kualitas pendidikan pada masa itu masih rendah. Hal ini disebabkan oleh penekanan pada pengembangan pengetahuan dan disiplin militer Jepang (Nurbaity, 2018).

Kebijakan Pendidikan Indonesia Setelah Kemerdekaan

Pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, dan efektivitas sistem pendidikan diukur dari proses masyarakat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (Irhamsyah, 2023).

Setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan dibangun dengan tingkat pendidikan yang sama seperti pada masa pendudukan Jepang, meskipun tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama dan kurikulum yang sama. Buku-buku pelajaran yang digunakan pada pendidikan setelah kemerdekaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yang dibuat pada masa pendudukan Jepang. Berikut susunan sekolah yang berlaku 1945 – 1950, antara lain:

1) Pendidikan Rendah, disebut sebagai Sekolah Rakyat (SR), berlangsung selama tiga sampai enam tahun.
2) Pendidikan Guru, yang dibagi menjadi tiga bagian, termasuk Sekolah Guru B, yang memiliki kurikulum empat tahun dan ditujukan untuk sekolah rakyat. Sekolah Guru C, Sekolah guru harus didirikan dengan cepat karena kebutuhan guru yang sangat mendesak di sekolah-sekolah rakyat. Terakhir adalah Sekolah Guru A, yang menawarkan pendidikan tiga tahun setelah sekolah menengah pertama, didirikan karena beberapa orang percaya bahwa pendidikan guru selama empat tahun tidak menjamin pengetahuan yang memadai tentang tingkat pendidikan guru.
3) Pendidikan umum dibagi menjadi dua bagian: sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMT). Setelah sekolah menengah pertama, siswa dapat melanjutkan pendidikan mereka selama tiga tahun sebelum mendaftar di perguruan tinggi.
4) Pendidikan kejuruan, yang dibagi menjadi dua sekolah: Sekolah Wanita dan Sekolah Ekonomi.
5) Pendidikan Teknik: Pada masa itu, terdapat sejumlah lembaga pendidikan teknik, antara lain Kursus Guru Teknik Tingkat Pertama (KGSTP), Kursus

Guru Teknik Tingkat I (KGST), Kursus Guru Teknik Tingkat II (KGT II), Kursus Kriya Negeri (KKN), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Teknik Menengah (STM), dan Pendidikan Guru untuk lembaga-lembaga Teknik.

6) Pendidikan Tinggi, sekolah dengan kurikulum lanjutan.
7) Pendidikan Tinggi Republik, setelah serangan militer pertama, Belanda menutup dua universitas terakhir, yang mengakibatkan kepunahan total. Akibatnya, pendidikan tinggi pada saat itu dibagi menjadi dua kategori, Pendidikan Tinggi Pendudukan Belanda dan Pendidikan Tinggi Republik.

Secara umum, pendidikan orde lama dipraktikkan setelah kemerdekaan pada masa pemerintahan Soekarno, yang memungkinkan akses pendidikan tanpa batas. Pemerintahan berbasis sosialis ini berfungsi sebagai kerangka dasar bagaimana pendidikan dikembangkan dan dikelola untuk pertumbuhan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan (Aisy & Hudaidah, 2021).

Republik Indonesia Serikat (RIS) didirikan pada tahun 1949, setelah Konferensi Meka Bundar. Pendidikan nasional juga diatur oleh Konstitusi RIS. Pasal 30 Konstitusi RIS 1950, yaitu ayat 1) Menetapkan kebijakan pendidikan nasional pada masa ini, setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, 2) Bebas memilih pelajaran yang akan diikuti, (3) Tidak ada penurunan pengawasan dari penguasa yang berlaku, dan pengajaran bersifat bebas (Fadli & Kumalasari, 2019).

Tujuan pendidikan telah berevolusi secara signifikan. Dari zamandramatis. Tujuan pendidikan di era Belanda adalah untuk menghasilkan kelas elit dan tenaga kerja yang terdidik dan murah; di abad Jepang, tujuannya adalah untuk memobilisasi militer dan tenaga kerja. Setelah kemerdekaan pada tahun 1946, pendidikan dicanangkan untuk menanamkan rasa patriotisme (Prasetyo & Destiyanti, 2023).

Perbedaan Kebijakan Pendidikan Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan

Pada masa sebelum kemerdekaan pendidikan Indonesia lebih berfokus untuk mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh Belanda sebagai pegawai administrasi atau tenaga kerja perkebunan. Dan akses pendidikan juga terbatas, pendidikan terbaik hanya diberikan kepada anak – anak Belanda atau golongan elite

pribumi. Sedangkan, kalangan pribumi yang merupakan rakyat biasa tidak mendapat pendidikan yang layak dan memiliki akses yang terbatas.

Pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan juga menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan, sehingga sulit untuk masyarakat pribumi dapat mengakses pendidikan dengan bahasa yang sulit dipahami. Dan kurikulum yang digunakan pada mas pendidikan Belanda juga tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia. Pendidikan seperti ini sangat menguntungkan pihak Belanda karena masyarakat yang berpendidikan akan masuk ke dalam administratif Belanda dan mempermudah penjajah untuk menguasai Indonesia.

Pendidikan Indonesia setelah merdeka diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional Indonesia. Dan pendidikan setelah kemerdekaan juga lebih terbuka dan merata bagi lapisan masyarakat, meski terkadang masyarakat lebih banyak tidak melanjutkan pendidikan tinggi namun masyarakat Indonesia sadar bahwa pendidikan dasar merupakan hal yang penting.

Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar utama pada pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan, dengan Bahasa Indonesia ini masyarakat lebih mudah untuk memahami dan mengakses pendidikan. Kurikulum yang dirancang juga relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan diarahkan untuk pembentukan karakter bangsa Indonesia. Dengan pendidikan Indonesia pada masa setelah kemerdekaan ini munculah tokoh – tokoh pendididkan seperti Ki Hajar Dewantara yang memberikan sumbangan besar dalam pengembangan pendidikan nasional Indonesia.

Hasil dari kebijakan pendidikan di era reformasi, dan juga pembentukan otonomi daerah dalam proses pembentukan pemerintahan daerah, adalah UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, produk politik pertama di era reformasi, memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur pendidikan di daerahnya sebagai pelaksana pemerintahan daerah (Maskuri, 2017).

KESIMPULAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Perbedaan yang mencolok antara sistem pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan terletak pada aksesibilitas, bahasa pengantar, dan relevansi kurikulum. Sebelum kemerdekaan, pendidikan dikuasai oleh penjajah dan hanya dapat diakses oleh kalangan bangsawan, sedangkan rakyat biasa dibatasi dan menghadapi kendala bahasa. Setelah kemerdekaan, pendidikan menjadi lebih inklusif dengan penggunaan Bahasa Indonesia dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional serta mendukung cita-cita bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, S. R., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia Di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama. EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 3(2), 569–577. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.327

Aiwan, A., & Rehani. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6).

Azizah, M., Zulmuqim, & Zalnur, M. (2023). Islamic Education in The Archipelago Before Independence Case Study: Dutch Colonial Political Policy Towards Islamic Education In Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Education, 1(2), 65–72.

Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Jurnal MEDTEK, 2(1).

Dangu, A. S., Sumarjiana, I. K. L., & Anto, R. (2022). SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN TAHUN 1945 - 1950. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(2), 4717–4718.

Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). Jurnal Agastya, 9(2).

Irhamsyah, T. (2023). KEBIJAKAN UMUM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR. Jurnal Hukum, Ekonomi dan Pendidikan Islam, 6(2). https://ejurnal.staipancabudi.ac.id/index.php/tabayyun/

Maskuri. (2017). KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA. JPII, 2(1).

Nurbaity. (2018). Pendidikan Indonesia Masa Kolonial Belanda dan Pemerintahan Pendudukan Jepang. Jurnal Agama dan Budaya, 16(1).

Prasetyo, H., & Destiyanti, A. Z. (2023). ANALISIS HISTORIS PENDIDIKAN ISLAM SEJAK KEMERDEKAAN, ORDE BARU, ERA REFORMASI HINGGA SEKARANG (ZONASI & FULL DAY SCHOOL). Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi, 3(1), 17–25.

Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6). http://repo.iain-

Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). PENGERTIAN PENDIDIKAN, ILMU PENDIDIKAN DAN UNSUR - UNSUR PENDIDIKAN. Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, 2(1).

Rahmawati, U., & Khoiri, Q. (2023). Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Kebijakan Publik. Journal on Education, 05(02), 4816–4825.

Rusdi, M. (2007). PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA SEBELUM PROKLAMASI KEMERDEKAAN. lentera pendidikan, 2.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV Alfabeta.

Wahyuni, F. (2015). KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). Al-Adabiya, 10(2).Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman